

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN TESIS	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis	9
1. Teori Tujuan Hukum	9
2. Teori Perlindungan	11
3. Teori Pidana	18
E. Kerangka Konsep	32
1. Konsep Kekerasan	32
2. Konsep Kekerasan Terhadap Perempuan	34
3. Konsep Kekerasan Terhadap Anak	35
4. Konsep Rumah Tangga	36
F. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan	38
3. Data dan Sumber Data	39
4. Pengolahan Data	40
G. Sistematika Penulisan	41
BAB II KAJIAN PUSTAKA	42
A. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
1. Proses Advokasi RUU Anti KDRT	42
2. Rencana UU usul Inisiatif DPR	47
3. Usulan Perbaikan	51
4. Penerbitan Amanat Presiden (AMPRES)	53
5. Pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004	55
B. Pengertian tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	56
1. Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan	56

2. Wacana Kekerasan Terhadap Anak	64
3. Kesadaran Masyarakat Internasional terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	70
BAB III METODOLOGI	76
1. Metode Pendekatan	76
2. Lokasi Penelitian	77
3. Sumber Data	77
4. Metode Pengumpulan Data	77
5. Metode Penyajian Data	78
6. Metode Validasi Data	78
7. Metode Analisis Data	78
BAB IV PEMBAHASAN	80
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	80
1. Azas Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	80
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	81
3. Perlindungan Korban	85
4. Ketentuan Pidana	87
5. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Tangerang	89
B. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Tangerang	91
1. UU No. 23 Tahun 2004 sebagai Lex Specialist terhadap KUHP	91
2. Perbedaan Persepsi Aparat Penegak Hukum	100
3. Delik Aduan	107
4. Pendampingan Korban	111
5. Lembaga Konseling	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran-Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	119